



TRITON

JURNAL MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

Volume 7, Nomor 1, April 2011

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

TEKNOLOGI PROSES PEGARAMAN DI INDONESIA

**VULNERABILITY INDICES AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL ISLANDS
THEIR UTILIZATION, USEFULNESS AND PROBLEMS : MALUKU CASE**

**KONSENTRASI KLOOROFIL-a PERMUKAAN
PERAIRAN TELUK AMBON DALAM**

**DISTRIBUSI STROMBIDAE DI ZONA INTERTIDAL
SEKITAR PERAIRAN PULAU-PULAU LEASE, MALUKU TENGAH**

**POLA SEBARAN SEDIMEN PANTAI PADA
PERAIRAN PANTAI HUTUMURI DAN WAYAME**

**PENGUJIAN SENSITIVITAS DAN EFEKTIVITAS ANTIBIOTIK
TERHADAP PENYAKIT VIBRIOSIS PADA
KERAPU TIKUS *Chromileptes altivelis***

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON**

TRITON

Vol. 7

No. 1

Hlm. 1-65

Ambon, April 2011

ISSN 1693-6493

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

*(Government Policies Influence on Fisheries Area Development
in Central Maluku Regency)*

James Abrahamsz

*Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura
Jl. Mr. Chr. Soplanit, Poka-Ambon
abrahamsz_amq@yahoo.com*

ABSTRACT: The aims of research are to develop theoretical model and to analyze government policies influence on fisheries area development in Central Maluku regency. The research was conducted from January to March 2010 at Central Maluku and province levels. Model components which can be influenced on each policy level were politic, economic, social and culture. The central policies influence on social aspects only, and the other side, politic and social were influenced. Policies execution focused on politic factors and social issues.

Keywords: Government policies, Influence, Fisheries area development.

PENDAHULUAN

Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu dari wilayah yang memberikan kontribusi perikanan terbesar bagi Provinsi Maluku. Hal ini tergambar pada 18,67% kontribusi yang diberikan terhadap produksi perikanan Maluku. Walaupun demikian, pembangunan perikanan di Maluku Tengah tidak terlepas dari berbagai persoalan.

Hasil identifikasi lapangan membuktikan bahwa persoalan perikanan di wilayah ini meliputi: Pertama, perbedaan wilayah ekologis, potensi sumber daya perikanan dan orientasi pemanfaatan sumber daya perikanan menyebabkan perbedaan tingkat produksi perikanan antar wilayah. Kedua, masih meluasnya kantong-kantong kemiskinan yang tercipta di sepanjang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/P3K yang memiliki posisi penting basis pengembangan perikanan. Ketiga, tidak terfokusnya kawasan pengembangan berbasis potensi kawasan menyebabkan dinamika pemanfaatan SDI oleh masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh tingkatan harga komoditas di pasar. Keempat, Maluku Tengah dengan perairan utama Laut Seram dan Laut Banda, yang termasuk dalam

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia, belum dijadikan basis pengembangan secara optimal pada tingkat Provinsi Maluku.

Kelima, program pemberdayaan masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor politik, sementara arahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil belum sepenuhnya berbasis pada kondisi sosial budaya dan kondisi ekonomi masyarakat. Keenam, konflik pemanfaatan ruang menyebabkan pembatasan akses masyarakat lokal dalam menjangkau *fishing ground*. Ketujuh, lemahnya interaksi internal kawasan dan dengan kawasan lain menyebabkan sempitnya orientasi aliran komoditas di Maluku Tengah. Kedelapan, kelemahan data/informasi perikanan dan dukungannya terhadap perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan perikanan di tingkat daerah.

Persoalan pengelolaan tersebut harus mendapat perhatian serius sebagaimana diinginkan pada level regulasi dan kebijakan. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan rumusan Pengelolaan Perikanan sebagai: “Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”. Rumusan ini memberikan amanat tentang pentingnya proses terintegrasi yang dilakukan pemerintah atau otoritas lain dalam pembangunan perikanan.

Mengacu pada konsep pengelolaan perikanan tersebut di atas, maka pengelolaan perikanan terkait erat dengan dua skala pengelolaan seperti dikemukakan Charles (2001): (1) skala waktu pengelolaan, dan (2) skala ruang pengelolaan. Kedua skala pengelolaan ini memberikan justifikasi tentang sangat dinamisnya pengelolaan perikanan. Hasil penelusuran terkait pengelolaan secara spasial, diperoleh konsepsi kawasan pengembangan yang memberikan arah dalam perumusan definisi kawasan pengembangan perikanan dengan beberapa beberapa kata kunci antara lain: (1) batasan ruang, (2) komponen isi ruang, (3) interaksi antar komponen pengisi ruang, dan (4) aspek-aspek pengembangan ruang.

Sesuai dengan persoalan perikanan yang dihadapi dan rumusan-rumusan regulasi serta konsepsi pengelolaan secara spasial, maka dua dari berbagai aspek yang menjadi penting untuk dikaji terkait dengan pengembangan kawasan perikanan di Maluku Tengah adalah: kebijakan pemerintah dan strategi pengembangannya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan batasan analisis pada level kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perikanan.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengembangkan model teoritis pengaruh kebijakan pengembangan kawasan perikanan; dan (2) menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian diharapkan dapat mengekspresikan model teoritis pengaruh, status dan tipologi kebijakan terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan Data

Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan responden. Pemilihan menggunakan pendekatan *purposive* dengan pilihan terhadap stakeholder yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 178 orang dengan dukungan kuisioner yang dibangun secara empiris dan justifikasi pilihan nilai penting secara kuantitatif menggunakan skala likert.

Pengumpulan data sekunder menggunakan pendekatan studi pustaka dan pengambilan data statistik perikanan Kabupaten Maluku Tengah dalam 10 tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, Januari – Maret 2010. Data dikumpulkan dengan pendekatan spasial dan bertingkat, per wilayah kecamatan dan pusat provinsi.

Metode Analisis Data

Analisis data untuk menjawab tujuan pengembangan model teoritis menggunakan pendekatan kajian empiris yang diekspresikan secara naratif. Model yang dibangun kemudian diterjemahkan dalam model fungsional matematis. Seluruh variabel yang ada dikelompokkan berdasarkan analisis koherensi kebijakan untuk tiap level.

Analisis pengaruh kebijakan menggunakan model regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan secara bertingkat mulai dari pengaruh kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pada pemerintah kabupaten. Model umum regresi yang digunakan adalah:

$$Y_{1j} = \alpha_{1j} + \beta_{1j}X_{1j} + \beta_{2j}X_{2j} \dots + \beta_{nj}X_{nj} \dots \dots \dots (1)$$

⋮

$$Y_{ik} = \alpha_{ik} + \beta_{ik}X_{ik} + \beta_{ik}X_{ik} \dots + \beta_{nk}X_{nk} \dots \dots \dots (2)$$

Ekstraksi kemudian dilakukan pada dua tahap, tahap 1 mengekstraksi koefisien pengaruh (β), dan tahap 2 mengekstraksi nilai signifikansi (p) pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ekstraksi untuk seluruh hubungan pengaruh, didistribusi secara tabular. Berdasarkan hasil ini, ditentukan status pengaruh kebijakan pemerintah terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan, meliputi:

- (1) Mendukung dan tidak signifikan (MTs) dengan syarat $\beta > 0; p > 0,5$
- (2) Mendukung dan signifikan (MS) dengan syarat $\beta > 0; p \leq 0,5$
- (3) Tidak mendukung dan signifikan (TmS) dengan syarat $\beta \leq 0; p \leq 0,5$
- (4) Tidak mendukung dan tidak signifikan (TmTs) dengan syarat $\beta \leq 0; p > 0,5$

Hasil analisis status menjadi input untuk memetakan tipologi pengaruh kebijakan yang dinyatakan secara grafis. Kondisi objektif tipologi dipetakan pada empat kuadran dimana status (1) akan terpetakan pada Kuadran I (kanan atas), status (2) pada kuadran II (kanan bawah), status (3) pada kuadran III, kiri bawah dan status (4) pada kuadran IV. Kombinasi analisis status dan tipologi menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kebijakan strategis pengembangan kawasan perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Teoritis Pengaruh Kebijakan Pengembangan Kawasan Perikanan

Model teoritis ini didasarkan pada hasil identifikasi aspek-aspek penting dalam kebijakan pemerintah. Seluruh aspek ini dikelompokkan berdasarkan perspektif makro dari suatu kebijakan dan didukung dengan koherensinya pada tiap level kebijakan pemerintah.

Pengembangan perikanan perlu dilakukan dengan konsep *fishery aquabusiness system*, dimana terdapat setidaknya 7 aspek utama pengembangan kawasan yang berbasis bisnis perikanan: sumberdaya perikanan dan kawasan, prasarana dan sarana, keuangan/permodalan, hukum dan kelembagaan, sumberdaya manusia, pasar dan IPTEK (Kusumastanto, 2002). Selanjutnya dinyatakan beberapa strategi pengembangan sistem bisnis perikanan secara terpadu melalui pembangunan sub-sub kawasan sebagai pusat pengembangan hulu dan hilir, peningkatan aktivitas produksi, pengembangan hukum dan kelembagaan, penataan lahan dan perairan pesisir/lautan, serta pengembangan kelayakan bisnis.

Kebijakan umum dalam pengembangan infrastruktur perikanan yang dirumuskan Direktorat Prasarana Tangkap DKP (2005) adalah: berorientasi pada kepentingan nasional, dan harus memenuhi syarat *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) bagi seluruh lapisan masyarakat, berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan dan ekonomi masyarakat (seluruh stakeholder perikanan), pengembangan dan penataan infrastruktur perikanan berdasarkan pada optimalisasi pemanfaatan SDI di 11 WPP dan menata infrastruktur perikanan guna optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi distribusi produk perikanan.

Pada bidang investasi permodalan penting disusun rencana pengembangan yang bersifat pada penerapan kebijakan untuk mengatur perkembangan usaha perikanan, Strategi ini diupayakan dapat meningkatkan sistem permodalan bagi nelayan skala kecil dan juga pelaku pendukung usaha perikanan. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan dalam pengembangan investasi perikanan tangkap antara lain adalah: peningkatan insentif investasi, peningkatan jaminan keamanan untuk kegiatan penangkapan ikan, peningkatan koordinasi dan penyederhanaan peraturan pungutan perikanan dan penerapan skim kredit khusus untuk perikanan (Charles, 2001; DFID, 2009; FAO, 1999; Fauzi, 2005, Garcia and Moreno, 2001; Mustaruddin, 2009; serta Widodo dan Suadi, 2006).

Beberapa strategi pengembangan ketenagakerjaan perikanan meliputi penyempurnaan peraturan dan perundangan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja; mekanisme rekrutmen dan distribusi tenaga kerja di beberapa kapal asing; reorientasi kegiatan pendidikan perikanan dan kelautan, sejak dari pendidikan tingkat menengah sampai pendidikan tinggi; dan pengembangan program pendidikan perikanan terapan kepada para ABK untuk meningkatkan jenjang karirnya sebagai *fishing master/captain/mechanical engineering* (Charles, 2001; FAO, 1999; Fauzi, 2005; Widodo dan Suadi, 2006; Gordon, 1954).

Kebijakan yang diwujudkan dalam upaya untuk memulihkan kelimpahan stok ikan pada daerah yang mengalami padat tangkap (Dirjen Perikanan Tangkap DKP, 2005) antara lain: identifikasi keragaan pemanfatan sumberdaya perikanan di berbagai WPP, evaluasi JTB untuk masing-masing WPP, pengendalian

intensitas penangkapan seperti mengalihkan armada penangkapan untuk beroperasi ke wilayah yang masih potensial, merintis penerapan pengaturan operasional waktu dan daerah penangkapan, minimalisasi *Illegal Fishing* dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum serta dibarengi dengan upaya penertiban perizinan usaha perikanan, perlindungan habitat kritikal, dengan mengembangkan daerah perlindungan laut yang dioperasionalkan secara *co-management*, kegiatan *sea ranching* maupun *restocking* untuk komoditas tertentu, pengurangan operasi kapal asing, koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya ikan dan optimasi /pemberdayaan kelompok nelayan peduli kelestarian sumberdaya ikan.

Pada tahap pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan, juga telah diberlakukan pembukaan 3 (tiga) jalur penangkapan yaitu zona I (0 – 4 mil dari garis pantai) untuk kapal berukuran < 5 GT, zona II (4 - 12 mil dari pinggir pantai) untuk kapal berukuran < 60 GT dan zona III (lebih dari 12 mil dari pinggir pantai) untuk kapal berukuran > 60 GT (Dirjen Perikanan Tangkap DKP, 2005).

Pada level provinsi, strategi pembangunan perikanan dan kelautan Propinsi Maluku yang akan ditempuh meliputi: penguatan kapasitas SDM perikanan dan kelautan serta kelembagaannya, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan, ekstensifikasi dan diversifikasi produk perikanan dan kelautan, optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum melalui desentralisasi kewenangan yang lebih besar, integrasi kelembagaan pengelola, *joint venture* dan kemitraan, efisiensi dalam alokasi dana serta pengembangan infrastruktur dan sistem informasi perikanan dan kelautan (DKP Provinsi Maluku, 2008).

Pada level kabupaten, Maluku Tengah memiliki tujuan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain: memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, meningkatkan devisa negara dari ekspor dan PAD, meningkatkan kesejahteraan nelayan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, menurunkan tingkat konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya, menurunkan tingkat pelanggaran pemanfaatan dan kerusakan sumberdaya, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, menyediakan teknologi data dan informasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan (DKP Maluku Tengah, 2007).

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten ini sampai dengan Tahun 2012 adalah peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan jumlah nelayan dan pembudidaya, tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan secara akurat, peningkatan konsumsi ikan per kapita, PAD, ekspor hasil perikanan, produksi perikanan antar pulau dan pendapatan nelayan, terbentuknya kemitraan dengan stakeholders, terwujudnya penyerapan tenaga kerja, tersedianya naskah akademik dan Perda di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan jumlah unit penangkapan, terminimalisasinya tingkat pelanggaran pemanfaatan dan kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan, terpeliharanya ekosistem pesisir dan laut serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

Hasil kajian empiris di atas menunjukkan adanya koherensi antar tiap level kebijakan. Bila dilakukan pengelompokan setiap aspek kebijakan, maka setidaknya ditemukan empat perspektif kebijakan yaitu politik, ekonomi, sosial

dan budaya. Keempat perspektif inilah yang diekstraksi memberikan pengaruh terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan.

Secara makro, model teoritis yang dapat dibangun untuk mengkaji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan (*SPK_P*) adalah:

$$SPK_P = f(KP, KE, KS, KB) \dots\dots\dots (3)$$

Dimana *KP* merupakan kebijakan politik, *KE* adalah kebijakan ekonomi, *KS* adalah kebijakan sosial, dan *KB* adalah kebijakan budaya.

Bila *SPK_P* secara hirarkhis dipengaruhi oleh level kebijakan pemerintah, maka model pada persamaan (3) dapat diperluas (*extended model*) menjadi:

$$SPK_P = f(KP_{Pus}, KE_{Pus}, KS_{Pus}, KB_{Pus}, KP_{Prov}, KE_{Prov}, KS_{Prov}, KB_{Prov}, KP_{Kab}, KE_{Kab}, KS_{Kab}, KB_{Kab}) \dots (4)$$

Dimana *Pus* adalah pusat, *Prov* adalah provinsi dan *Kab* adalah Kabupaten.

Hasil studi empiris juga membuktikan bahwa *SPK_P* meliputi beberapa komponen strategis terutama yang terkait aspek kinerja kawasan (Kaplan dan Norton, 2000; Yuwono *dkk.*, 2007) yaitu pengembangan produksi (*Prod*), pemasaran (*Psr*), penanganan keuangan (*Fin*), pengembangan sumberdaya manusia (*SDM*), serta implementasi penelitian dan pengembangan (*R&D*). Dengan pendekatan ini, maka model pada persamaan (4) dapat diturunkan menjadi lima model parsial sebagai berikut:

$$S_{Prod} = f(KP_{Pus}, KE_{Pus}, KS_{Pus}, KB_{Pus}, KP_{Prov}, KE_{Prov}, KS_{Prov}, KB_{Prov}, KP_{Kab}, KE_{Kab}, KS_{Kab}, KB_{Kab}) \dots(5a)$$

$$S_{Psr} = f(KP_{Pus}, KE_{Pus}, KS_{Pus}, KB_{Pus}, KP_{Prov}, KE_{Prov}, KS_{Prov}, KB_{Prov}, KP_{Kab}, KE_{Kab}, KS_{Kab}, KB_{Kab}) \dots(5b)$$

$$S_{Fin} = f(KP_{Pus}, KE_{Pus}, KS_{Pus}, KB_{Pus}, KP_{Prov}, KE_{Prov}, KS_{Prov}, KB_{Prov}, KP_{Kab}, KE_{Kab}, KS_{Kab}, KB_{Kab}) \dots(5c)$$

$$S_{SDM} = f(KP_{Pus}, KE_{Pus}, KS_{Pus}, KB_{Pus}, KP_{Prov}, KE_{Prov}, KS_{Prov}, KB_{Prov}, KP_{Kab}, KE_{Kab}, KS_{Kab}, KB_{Kab}) \dots(5d)$$

$$S_{R\&D} = f(KP_{Pus}, KE_{Pus}, KS_{Pus}, KB_{Pus}, KP_{Prov}, KE_{Prov}, KS_{Prov}, KB_{Prov}, KP_{Kab}, KE_{Kab}, KS_{Kab}, KB_{Kab}) \dots(5e)$$

Model parsial yang terbangun pada persamaan 5a sampai dengan 5e menunjukkan bahwa pada seluruh level kebijakan, perspektif politik, ekonomi, sosial dan budaya berpotensi memberikan pengaruh pada seluruh komponen strategi pengembangan kawasan, baik pengembangan produksi, pemasaran, penanganan keuangan, pengembangan sumberdaya manusia maupun penelitian dan pengembangan.

Pengaruh Kebijakan Terhadap Pengembangan Kawasan Perikanan

Analisis yang dilakukan secara bertingkat dengan pendekatan model regresi linier berganda menghasilkan sejumlah koefisien dan nilai yang menjadi indikasi pengaruh. Dalam penelitian ini digunakan dua indikator pengaruh yaitu koefisien pengaruh dan nilai signifikasi. Hasil analisis secara parsial menunjukkan distribusi

koefisien pengaruh yang berbeda untuk tiap dari tiap jenis dan/atau level kebijakan pemerintah terhadap komponen strategis pengembangan kawasan perikanan (Tabel 1).

Tabel 1. Distribusi koefisien pengaruh kebijakan pemerintah terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah

Kebijakan Pemerintah	Strategi Pengembangan Kawasan				
	Produksi	Pemasaran dan Distribusi	Finansial	Pengembangan SDM	Penelitian dan Pengembangan
KP_Pus	0,05	-0,14	0,13	0,27	-0,10
KE_Pus	-0,08	0,23	-0,02	0,07	0,06
KS_Pus	0,43	0,19	0,33	0,58	0,78
KB_Pus	0,01	0,15	0,12	-0,13	-0,21
KP_Prov	0,37	-0,11	0,25	0,29	0,22
KE_Prov	-0,03	0,13	-0,17	0,21	0,29
KS_Prov	0,00	0,41	0,34	0,35	0,24
KB_Prov	0,23	-0,04	0,09	-0,14	0,03
KP_Kab	0,35	-0,09	0,29	0,27	0,25
KE_Kab	0,18	0,19	-0,06	0,07	0,07
KS_Kab	0,07	0,46	0,35	0,58	0,50
KB_Kab	0,20	-0,07	0,10	-0,13	-0,05

Keterangan: Bagian yang diarsir memberikan pengaruh negatif.

Dua jenis pengaruh yang teridentifikasi dari hasil analisis ini adalah: pengaruh secara positif dan negatif. Pengaruh positif mengindikasikan adanya dukungan dari suatu jenis dan/atau level kebijakan pemerintah. Pengaruh negatif mengindikasikan adanya kendala atau hambatan yang diberikan suatu jenis dan/atau level kebijakan terhadap komponen strategis pengembangan kawasan perikanan.

Pada level kebijakan pemerintah pusat, kebijakan politik memberikan pengaruh negatif terhadap strategi pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Kebijakan ekonomi pada level ini tidak mendukung pengembangan produksi dan penanganan finansial untuk membiayai kegiatan produksi. Kebijakan sosial secara menyeluruh mendukung komponen strategis pengembangan kawasan perikanan. Kebijakan budaya tidak mendukung pengembangan sumberdaya manusia serta penelitian dan pengembangan.

Pada level kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan politik juga memberikan pengaruh negatif terhadap strategi pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Demikian halnya dengan kebijakan ekonomi tidak mendukung pengembangan produksi dan penanganan finansial untuk membiayai kegiatan produksi. Pada level ini, kebijakan sosial juga secara menyeluruh mendukung komponen strategis pengembangan kawasan perikanan. Kebijakan budaya tidak mendukung proses pemasaran dan produksi hasil perikanan serta pengembangan sumberdaya manusia.

Pada level kebijakan pemerintah kabupaten, kebijakan politik turut memberikan pengaruh negatif terhadap strategi pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Kebijakan ekonomi pada level ini tidak mendukung hanya pada penanganan finansial untuk membiayai kegiatan produksi. Kebijakan sosial secara menyeluruh mendukung komponen strategis pengembangan kawasan perikanan.

Kebijakan budaya tidak mendukung pemasaran dan distribusi hasil perikanan, pengembangan sumberdaya manusia serta penelitian dan pengembangan.

Evaluasi yang dapat diberikan terkait dengan hasil analisis tersebut antara lain: (1) kebijakan sosial pada setiap level kebijakan secara holistik mendukung strategi pengembangan kawasan perikanan; (2) aspek pemasaran dan distribusi hasil perikanan relatif kurang mendapat perhatian terkait dengan kebijakan politik dan budaya; (3) pendekatan budaya pada level kebijakan pemerintah kabupaten masih sangat kurang; (4) kebijakan ekonomi sama sekali tidak memperhatikan aspek finansial terkait dengan pembiayaan kegiatan produksi; dan (5) kegiatan produksi serta penelitian dan pengembangan mendapat perhatian yang sangat kuat dari seluruh level kebijakan pemerintah.

Hasil analisis secara parsial juga menghasilkan nilai signifikansi yang relatif berbeda untuk tiap jenis dan/atau level kebijakan pemerintah (Tabel 2). Batasan tingkat kepercayaan 95% memberikan batasan terhadap signifikansi pengaruh kebijakan terhadap strategi pengembangan kawasan.

Tabel 2. Distribusi nilai signifikansi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah

Kebijakan Pemerintah	Strategi Pengembangan Kawasan				
	Produksi	Pemasaran dan Distribusi	Finansial	Pengembangan SDM	Penelitian dan Pengembangan
KP_Pus	0,58	0,11	0,18	0,01	0,35
KE_Pus	0,37	0,01	0,86	0,45	0,53
KS_Pus	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
KB_Pus	0,87	0,07	0,17	0,14	0,03
KP_Prov	0,00	0,22	0,01	0,00	0,04
KE_Prov	0,75	0,15	0,07	0,03	0,01
KS_Prov	0,95	0,00	0,00	0,00	0,02
KB_Prov	0,01	0,64	0,26	0,12	0,76
KP_Kab	0,00	0,34	0,00	0,00	0,03
KE_Kab	0,13	0,10	0,64	0,09	0,66
KS_Kab	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
KB_Kab	0,02	0,40	0,27	0,58	0,64

Keterangan: Bagian yang diarsir tidak memiliki signifikansi > 95%.

Dua jenis nilai signifikansi teridentifikasi dari hasil analisis ini adalah: pengaruh signifikan dan pengaruh tidak signifikan. Pengaruh signifikan mengindikasikan selain adanya dukungan dari suatu jenis dan/atau level kebijakan pemerintah, juga dapat digunakan sebagai variabel intervensi kebijakan. Pengaruh tidak signifikan mengindikasikan selain adanya kendala atau hambatan yang diberikan suatu jenis dan/atau level kebijakan terhadap komponen strategis pengembangan kawasan perikanan, juga tidak dapat digunakan sebagai variabel intervensi kebijakan.

Pada level kebijakan pemerintah pusat, kebijakan politik memberikan pengaruh yang signifikan hanya pada pengembangan SDM. Kebijakan ekonomi hanya berpengaruh signifikan pada strategi pemasaran dan distribusi hasil produksi. Kebijakan sosial secara menyeluruh memberikan pengaruh yang signifikan terhadap komponen strategis pengembangan kawasan perikanan. Kebijakan budaya hanya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penelitian dan pengembangan.

Pada level kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan politik memberikan pengaruh yang signifikan hanya pada pengembangan SDM. Kebijakan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seluruh komponen strategis kecuali strategi pemasaran dan distribusi hasil produksi. Kebijakan sosial berpengaruh signifikan secara menyeluruh terhadap komponen strategis pengembangan kawasan perikanan, kecuali pada strategi produksi. Kebijakan budaya berpengaruh signifikan hanya pada strategi produksi.

Pada level kebijakan pemerintah kabupaten, kebijakan politik berpengaruh signifikan pada seluruh komponen strategis kecuali strategi pemasaran dan distribusi. Kebijakan ekonomi pada level ini sama sekali tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap strategi pengembangan kawasan. Kebijakan sosial berpengaruh signifikan secara menyeluruh, kecuali strategi produksi. Kebijakan hanya memberikan pengaruh signifikan terhadap strategi produksi.

Signifikansi pengaruh secara holistik menunjukkan beberapa kondisi sebagai berikut: (1) kebijakan sosial pada setiap level kebijakan secara holistik mempengaruhi strategi pengembangan kawasan perikanan; (2) aspek produksi, pemasaran dan distribusi hasil perikanan serta finansial relatif kurang berpengaruh dalam pengembangan kawasan; (3) pendekatan budaya pada level kebijakan pemerintah kabupaten masih sangat kurang; (4) kebijakan politik, ekonomi dan budaya dari pemerintah pusat hampir tidak berpengaruh secara holistik; kebijakan ekonomi dan budaya dari pemerintah provinsi hampir tidak berpengaruh secara holistik; sedangkan pada level pemerintah kabupaten yakni ekonomi dan budaya secara holistik hampir tidak memberikan pengaruh terhadap pengembangan kawasan perikanan; dan (5) kegiatan pengembangan SDM serta penelitian dan pengembangan mendapat perhatian yang sangat kuat dari seluruh level kebijakan pemerintah. Integrasi dari kedua hasil di atas memberikan justifikasi tentang status pengaruh kebijakan pemerintah terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan. Hasil integrasi yang dinyatakan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa secara riil, tidak seluruh jenis dan/atau level kebijakan berpengaruh terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan.

Tabel 3. Status pengaruh kebijakan pemerintah terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah

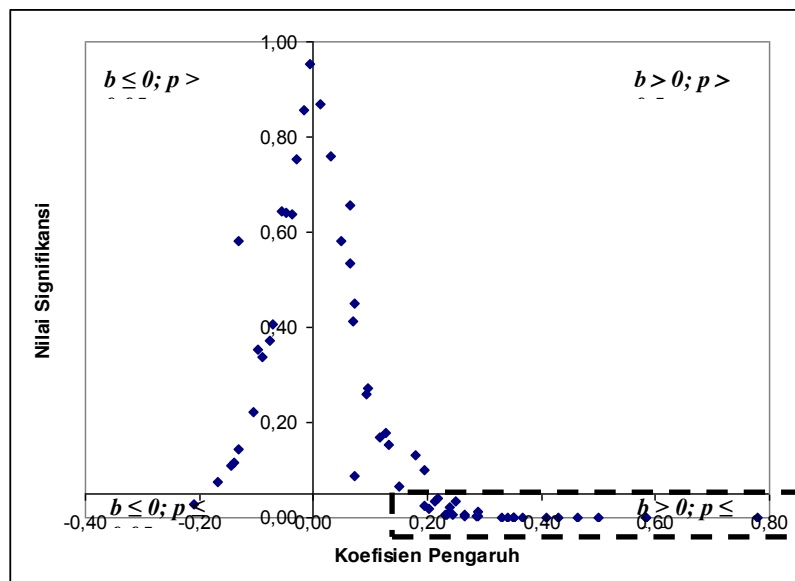
Kebijakan Pemerintah	Strategi Pengembangan Kawasan				
	Produksi	Pemasaran dan Distribusi	Finansial	Pengembangan SDM	Penelitian dan Pengembangan
KP_Pus	MTs	TmTs	MTs	MS	MTs
KE_Pus	TmTs	MS	TmTs	MTs	MTs
KS_Pus	MS	MS	MS	MS	MS
KB_Pus	MTs	MTs	MTs	MTs	TmS
KP_Prov	MS	TmTs	MS	MS	MS
KE_Prov	TmTs	MTs	TmTs	MS	MS
KS_Prov	MTs	MS	MS	MS	MS
KB_Prov	MS	TmTs	MTs	TmTs	MTs
KP_Kab	MS	TmTs	MS	MS	MS
KE_Kab	MTs	MTs	TmTs	MTs	MTs
KS_Kab	MTs	MS	MS	MS	MS
KB_Kab	MS	TmTs	MTs	TmTs	TmTs

Keterangan: Bagian yang diarsir mengandung sedikitnya salah satu dari pengaruh negatif dan tidak memiliki signifikansi > 95%.

Berdasarkan level kebijakan pemerintah, pengaruh yang diberikan terhadap strategi pengembangan kawasan meliputi:

- (1) Di level pusat, kebijakan politik berpengaruh terhadap aspek pengembangan SDM; kebijakan ekonomi terhadap pemasaran dan distribusi hasil; serta kebijakan sosial terhadap seluruh komponen strategis pengembangan kawasan perikanan.
- (2) Di level provinsi, kebijakan politik berpengaruh terhadap produksi, finansial, pengembangan SDM serta penelitian dan pengembangan; kebijakan ekonomi berpengaruh terhadap pengembangan SDM serta penelitian dan pengembangan; kebijakan sosial berpengaruh terhadap pemasaran dan distribusi, finansial, pengembangan SDM serta penelitian dan pengembangan; sedangkan kebijakan budaya berpengaruh terhadap strategi produksi.
- (3) Di level kabupaten, kebijakan politik berpengaruh terhadap strategi produksi, finansial, pengembangan SDM serta penelitian dan pengembangan; kebijakan ekonomi sama sekali tidak berpengaruh; kebijakan sosial berpengaruh terhadap pemasaran dan distribusi, finansial, pengembangan SDM serta penelitian dan pengembangan; sedangkan budaya berpengaruh terhadap strategi produksi.

Hasil ini membuktikan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap strategi pengembangan kawasan perikanan masih tergolong lemah. Hal juga terbukti pada hasil pemetaan tipologi kebijakan yang menunjukkan bahwa dari 60 hubungan kebijakan yang dibangun hanya 21 hubungan saja yang menunjukkan adanya pengaruh (Gambar 2).



Gambar 1. Pemetaan tipologi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah

Pembuktian yang juga terlihat dari hasil pemetaan bahwa umumnya ruang pengaruh kebijakan pemerintah sangat sempit. Di level pusat keberpihakan hanya pada aspek sosial, sedangkan di level provinsi dan kabupaten pada aspek politik dan sosial. Tipologi kebijakan menjustifikasi eksekusi kebijakan yang diberikan masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik maupun isu-isu sosial pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menemukan masih banyak jenis dan level kebijakan yang harus didorong untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan. Kebijakan ekonomi yang seharusnya dibutuhkan untuk mendorong dinamika ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat nelayan masih cukup lemah, sementara kebijakan yang berpihak pada budaya lokal juga masih harus didorong untuk menjadi perhatian yang mendasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini meliputi: (1) komponen model yang berpeluang memberikan pengaruh pada setiap level kebijakan adalah kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya; (2) Pada level pusat keberpihakan pengembangan kawasan perikanan hanya pada aspek sosial, sedangkan di level provinsi dan kabupaten pada aspek politik dan sosial. Eksekusi kebijakan yang diberikan masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik maupun isu-isu sosial pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan di Maluku Tengah, kebijakan ekonomi dan budaya masih harus ditingkatkan keberpihakannya. Keberpihakan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, disamping keberpihakan terhadap nilai-nilai lokal terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. 2004. *Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jakarta. 400 hal.
- Biro Perencanaan Departemen Kelautan dan Perikanan. 2009. *Indonesian Fisheries Book 2009*. Ministry of Marine Affairs and Fisheries and Japan International Cooperation Agency. Jakarta. 84 pp.
- Charles, A.T. 2001. *Sustainable Fishery Systems*. Blackwell Science Ltd. Victoria. 370p.
- DFID. 2009. *Fisheries and Governance*. FMSP Policy Brief 5. London, United Kingdom. 4p.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. 2007. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2007-2012. Masohi. 53 hal.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. 2010. Laporan Tahunan 2009. Masohi. 59 hal.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. 2008. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2008-2013. Ambon. 86 hal.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. Strategi Pengelolaan Kawasan Perikanan Terpadu di Sentra-Sentra Kegiatan Nelayan. Buletin Kawasan, Edisi 13, 2005. Publikasi: Direktorat Kewilayahan II, Deputi Deputi Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas. Halaman: 17 – 19.
- Direktorat Kawasan Khusus dan Tertinggal. 2004. *Tata Cara Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah*. Bappenas. Jakarta. 400 halaman.

- FAO. 1999. *Indicators for Sustainable Development of Marine Capture Fisheries*. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 8. Rome, Italy. 68p.
- Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis dan Gagasan*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 185 hal.
- Gordon, H. 1954. The Economic Theory of a Common Property Resource: The Fishery. *Journal Political Economics*, 62: 124-142.
- Garcia, M.S. and I.D. Moreno. 2001. *Global Overview of Marine Fisheries*. Paper presented in Reykjavik Conference on Responsible Fisheries in Marine Ecosystem.
- Kaplan, R.S. dan D.P. Norton. 2000. *Balanced Scorecard; Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*. Penerbit: Erlangga. Jakarta. 276 hal.
- Kusumastanto, T. 2002. Reposisi Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan, FPIK IPB.
- Mustaruddin. 2009. Pola Pengembangan Industri Perikanan Tangkap di Kabupaten Indramayu Menggunakan Pendekatan Analisis Persamaan Struktural. *Buletin PSP*. Vol.XVIII, No.2, Agustus 2009. Bogor. Hal: 103-112.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 45 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan. Jakarta.
- Townsley, P. 1998. *Social Issues in Fisheries*. FAO Technical Paper 375. Rome, Italy.
- Weimer, D.L and A.R. Vining. *Policy Analysis; Concepts and Practice*. Prentice Hall, New Jersey. 486p.
- Widodo, J dan Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 252 hal.
- Yuwono, S., E. Sukarno, dan M. Ichsan. 2007. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard; Menuju Organisasi yang Terfokus pada Strategi*.